

**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA, TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN
TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Cici Mayuza



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

Cici Mayuza

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, terhadap kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2015-2013. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki hubungan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Dana Desa, Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, TPAK.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF VILLAGE FUND ALLOCATION, LABOR FORCE PARTICIPATION RATE, EDUCATION, AND HEALTH ON POVERTY IN LAMPUNG PROVINCE

By:

Cici Mayuza

This study aims to analyze the influence of village funds, labor force participation rates, as well as government expenditure in the education and health sectors on poverty across 13 regencies in Lampung Province. The study utilizes secondary data covering the period from 2015 to 2023. The data analysis employs the panel data regression method, specifically utilizing the Fixed Effect Model (FEM). The research results demonstrate that village funds and government expenditures in the education and health sectors are negatively and significantly associated with poverty. Conversely, the labor force participation rate exhibits no significant impact on poverty.

Keywords: Education, Government Expenditure, Health, Labor Force Participation Rate, Poverty, Village Funds.

**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Cici Mayuza

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Analisi Pengaruh Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Provinsi Lampung**

Nama Mahasiswa : **Cici Mayuza**

Npm : **1911021035**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

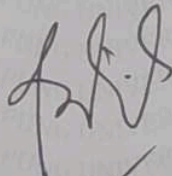
MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.
NIP. 198505102010122004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Arvina Ratih, Y.T, S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

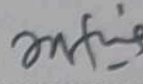
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

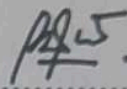
Ketua : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.


.....

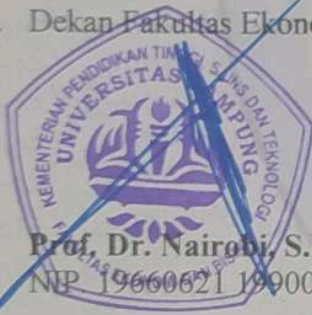
Penguji I : Emi Maimunah, S.E., M.Si.


.....

Penguji II : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.


.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Maret 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Mayuza

NPM : 1911021035

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan Provinsi Lampung” adalah hasil karya yang saya kerjakan sendiri. Dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penullis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Mei 2026
Yang Membuat pernyataan



CICI MAYUZA
NPM. 1911021035

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cici Mayuza yang lahir pada 9 Januari 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga saudara yang lahir dari pasangan Bapak Alm. Maryadi dan Ibu Aisyah. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 2 Banding Agung pada tahun 2007. Setelah lulus SD Penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Talang Padang. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMK Negeri 1 Talang Padang dengan Jurusan Akuntansi. Kemudian pada tahun yang sama, Penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan belajar yang diberikan oleh dosen dan taat pada peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada tahun 2021, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2022, Penulis diterima magang di Ombudsman Provinsi Lampung selama 2 bulan.

MOTTO

**“Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah...”**

- Az-Zumar: 53

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

-Ar-Ra'd: 11

**“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan.”**

- Ash-Sharh: 5-6

“Sebelum Benar-benar Pulang, Ayo Tetap Berjuang!”

- Cici Mayuza

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bakti yang tulus kepada:

Kedua orang tuaku tercinta.

Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Emak ku Aisyah, untuk setiap do'a tulus yang dipanjatkan untuk kelancaran hidupku, untuk setiap semangat yang diberikan, untuk setiap masakan enak yang disajikan ketika aku pulang ke rumah, dan untuk setiap pengertiannya selama beberapa tahun ini. Setiap dukungan cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga ini tidak mungkin dapat terbalas hanya dengan beberapa baris kalimat dalam persembahan ini. Semoga Emak selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan yang tidak terhingga dalam hidup.

Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ayahku Alm. Maryadi, atas segala bentuk cinta kasih yang diberikan semasa hidupnya untukku, untuk setiap dukungan serta doa-doa baik yang sudah dipanjatkan untukku. Semoga Allah SWT menerima segala amal perbuatan Ayah dan senantiasa ditempatkan di sisi-Nya yang paling mulia.

Kedua abangku tersayang.

Wangga Prawira dan Wanda Wirantara, terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan untukku sampai saat ini.

Seluruh keluarga besar yang menyayangiku.

Semua sahabat, dan orang-orang terdekat yang selalu ada dan memberikan perhatiannya yang tulus kepada ku.

*Dan untuk almamater tercinta
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.*

Semoga karya yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Provinsi Lampung.” Sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar strata satu (S1) di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang Penulis jalani selama ini memberikan kesadaran diri bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis masih sangat terbatas, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari segala kesulitan dan hambatan, sehingga dalam proses penyelesaiannya Penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan dan dukungan moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan penuh ketulusan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing Penulis di akhir batas masa studi ini, yang bersedia memberikan banyak masukan dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P. selaku Dosen Pembimbing skripsi pertama Penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu yang tak ternilai kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa studi.
6. Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., serta Ibu Dr. Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas saya di seminar 1 dan seminar 2, yang sudah memberikan masukan, nasihat, dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si., dan Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji Penulis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasihat, dan saran yang membangun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Pak Elvi dan Mba Dike selaku Staf jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membantu Penulis dalam pemberkasan untuk ujian skripsi, serta seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan pelayanan untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.

10. Kedua orang tuaku tercinta, Emakku Aisyah dan Ayahku Maryadi (Alm), serta kedua abang ku yang tersayang, Wanda Wirantara dan Wangga Prawira. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua cinta dan kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan selama ini. Terima kasih atas setiap do'a untukku yang dipanjatkan dengan ketulusan hati di setiap waktunya. Terimakasih atas semua semangat, pengorbanan, dan setiap dukungan moril yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, menempatkan Ayah disisi terbaik-Nya, dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

11. Seluruh keluarga besar yang menyayangiku dan selalu memberikan semangat, dan do'a untuk penulis.

12. Sahabat-sahabat ku tersayang sejak di bangku SMP dan sejak memasuki SMK, Anggun Indah, Berliana Fiorentina, Alfina Khoiriyah, Meriza Dewi, Juwita, Clara Oktavia, dan Sabila Mutia. Terima kasih untuk setiap waktu yang dihabiskan untuk menemaniku dikala suka maupun duka, terima kasih atas setiap do'a dan dukungan moril yang terucap untukku. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan hidup dimanapun kalian berada.

13. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Ekonomi Pembangunan, Elsa, Wika, Catherine, Mellani, Puspa, Vania, Anggi, Ulya, Adel, Nafsiah, Fitri, Hanna, Lusi, Naufaliya, Grahito, Arif dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua cerita, pengalaman, serta bantuannya selama masa perkuliahan maupun selama penyelesaian skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan hidup dan bermanfaat untuk orang lain.

14. Untuk teman-teman KKN ku di Desa Bangun Rejo, Mba Uli, Mba sifa, Feby, Ridho, Edo, Iqbal, dan Luthfi. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan dalam menyelesaikan program kerja selama 40 hari. Terima Kasih juga kepada keluarga Bapak Husain yang sudah sangat baik hati saat proses KKN

berlangsung. Semoga kita semua selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup.

15. Untuk orang-orang baik yang penulis jumpai selama proses skripsi ini berjalan, Kak Melinda, Mba Nurul, Yuni, Laila, terima kasih banyak atas setiap cerita, canda dan tawa yang dibagikan sehingga menghasilkan semangat hidup untuk penulis. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup.

16. Untuk keluarga besar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Terima kasih atas pengalaman, ilmu, motivasi dan kebahagiaan yang diberikan selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL).

17. Almamater yang ku banggakan, Universitas Lampung.

18. Pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

19. Terima kasih untuk diri sendiri karena memutuskan untuk tidak menyerah. Terima kasih karena telah bertahan dan memilih untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangat diharapkan. Semoga penelitian yang sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Mei 2026

Penulis,

Cici Mayuza

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Teori	16
1. Pengeluaran Pemerintah	16
2. Fungsi APBN.....	19
3. Transfer.....	20
4. Keuangan Daerah.....	21
5. Pendapatan Desa	22
6. Kemiskinan	26
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	32
8. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	34
9. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	35
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran	38
D. Hipotesis Penelitian.....	39
III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sumber Data.....	40
B. Definisi Operasional Variabel.....	41
C. Metode Analisis	43

1.	Spesifikasi Model Penelitian	43
2.	Uji Spesifikasi Model Penelitian	45
3.	Uji Asumsi Klasik.....	47
4.	Individual Effect	48
5.	Pengujian Hipotesis	49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
A.	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
1.	Kemiskinan (KM).....	61
2.	Dana Desa (DD).....	61
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	62
4.	Pendidikan (PDD).....	63
5.	Kesehatan (KS)	64
B.	Hasil Regresi Model Data Panel	64
1.	Uji Chow.....	64
2.	Uji Hausman	65
C.	Hasil Pengujian Asumsi Kalsik.....	66
1.	Uji Asumsi Normalitas	66
2.	Uji Heteroskedastistas.....	67
3.	Uji Multikolinearitas.....	68
4.	Uji Autokorelasi.....	69
D.	Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel.....	69
E.	Hasil Pengujian Hipotesis.....	71
1.	Uji Parsial (Uji t).....	71
2.	Uji Signifikan Simultan (Uji F-Statistik).....	73
3.	Koefisien Determinasi (R ²).....	74
F.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
1.	Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan.....	74
2.	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan.....	75
3.	Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan	77
4.	Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan.....	78
G.	Individual Effect.....	80

V. SIMPULAN DAN SARAN	90
A. Simpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2023 (Dalam Ribu Jiwa)	2
2. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Dalam Ribu Jiwa).....	3
3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 (Dalam Ribu Jiwa)	4
4. Penelitian Terdahulu	36
5. Deskripsi Data.....	41
6. Hasil Analisis Deskriptif.....	48
7. Uji Chow	65
8. Uji Hausman	65
9. Uji Heteroskedastisitas.....	67
10. Uji Multikolinearitas	68
11. Hasil Regresi.....	70
12. Hasil Uji t-statistik Variabel Dana Desa	71
13. Hasil Uji t-statistik Variabel Tingkat Partisipasi Akngatan Kerja	72
14. Hasil Uji t-statistik Variabel Pendidikan	72
15. Hasil Uji t-statistik Variabel Kesehatan.....	73
16. Hasil Uji F-statistik	73
17. Nilai Individual Effect Intersep 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rata-rata Kemiskinan dan Dana Desa Sejak Tahun 2015-2023	5
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung.....	8
2. Kurva Teori Peacock dan Wiseman.....	18
3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman.....	19
4. Dampak Transfer pada Anggaran Daerah.....	20
5. Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse.....	31
6. Skema Kerangka Pemikiran.....	39
8. Hasil Uji Normalitas	66
9. Uji Durbin-Watson.....	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat, disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan kemiskinan (Ayu dan Husaini 2013). Ketika kemiskinan berkurang maka salah satu tujuan pembangunan nasional telah terwujud sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik dari segi sandang, pangan, maupun papan. Kemiskinan juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sehingga berkenaan dengan pembangunan manusia, menurut Wijayanti & Wahono (2005), dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Hasanuddin et al. (2009), Sumber kemiskinan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan struktural. Seperti yang dijelaskan di dalam *website* resmi DPR RI, seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. BPS menghitung Garis kemiskinan berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret

atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif. Garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat harga, standar hidup, dan pola konsumsi di setiap daerahnya. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan.

Sedangkan kemiskinan struktural menurut Widiastuti (2010), adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka, hal ini karena mereka merasa lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan sampai saat ini masih sulit untuk dipecahkan, khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kemiskinan menjadi sebuah permasalahan fundamental yang menjadi pusat perhatian oleh pemerintah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2023 (Dalam Ribu Jiwa)

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Selisih	Jumlah
2015	10619.86	17893.71	7273.85	28513.57
2016	10485.64	17278.68	6793.04	27764.32
2017	10272.55	16310.44	6037.89	26582.99
2018	10131.28	15543.31	5412.03	25674.58
2019	9857.75	14928.12	5070.37	24785.87
2020	12038.5	15511.19	3472.69	27549.69
2021	11859.34	14644.3	2784.96	26503.65
2022	11980.32	14382.95	2402.63	26363.27
2023	11736.36	14162.19	2425.83	25898.55

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami tren penurunan, namun di tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali meningkat karena adanya pandemi. Kemudian di tahun berikutnya, penduduk Indonesia perlahan bangkit untuk memulihkan perekonomian paska terjadinya pandemi. Jumlah penduduk miskin kembali mengalami tren penurunan yang stabil meskipun belum mencapai angka seperti di 4 tahun sebelumnya.

Kemudian, di Pulau Sumatera terdapat beberapa provinsi dengan jumlah penduduk miskinnya terbesar salah satunya adalah Provinsi Lampung.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Dalam Ribu Jiwa)

Provinsi	2021	2022	2023
ACEH	850,26	818,47	806,75
SUMATERA UTARA	1.273,07	1.262,09	1.239,71
SUMATERA BARAT	339,93	343,82	340,37
RIAU	496,66	493,13	485,66
JAMBI	276,86	283,82	280,68
SUMATERA SELATAN	1.116,61	1.054,99	1.045,68
BENKULU	291,79	292,93	288,46
LAMPUNG	1.007,02	995,59	970,67
KEP. BANGKA BELITUNG	69,70	69,69	68,69
KEP. RIAU	137,75	148,89	142,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung selalu menduduki lima besar provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena beberapa kebijakan yang di lakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Melihat kesenjangan yang terjadi antar provinsi di Pulau Sumatera ini maka harus dilakukan analisis penyebabnya.

Kemiskinan daerah sebagian besar merupakan hasil agregasi dari kemiskinan pedesaan (Wahyudi dan Khotimah 2022). BPS mengklasifikasikan pedesaan sebagai

desa/kelurahan yang tidak memiliki klasifikasi wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan yang dimaksud yaitu ketika kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di atas 10. Beberapa kelurahan di kota adalah wilayah pedesaan, dan beberapa desa di kabupaten adalah wilayah perkotaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3, dalam sembilan tahun terakhir, di Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin pedesaan lebih besar dari perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses masyarakat miskin di pedesaan terhadap berbagai sumber daya ekonomi, meskipun berbagai kebijakan pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang terlalu maksimal.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 (Dalam Ribu Jiwa)

Tahun	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan+Perkotaan
2015	902,74	197,94	1.100,68
2016	912,34	227,44	1.139,78
2017	871,77	211,97	1.083,74
2018	861,40	230,20	1.091,60
2019	816,79	224,69	1.041,48
2020	831,86	259,28	1.091,14
2021	770,54	236,48	1.007,02
2022	756,48	239,11	995,59
2023	737,71	232,96	970,67

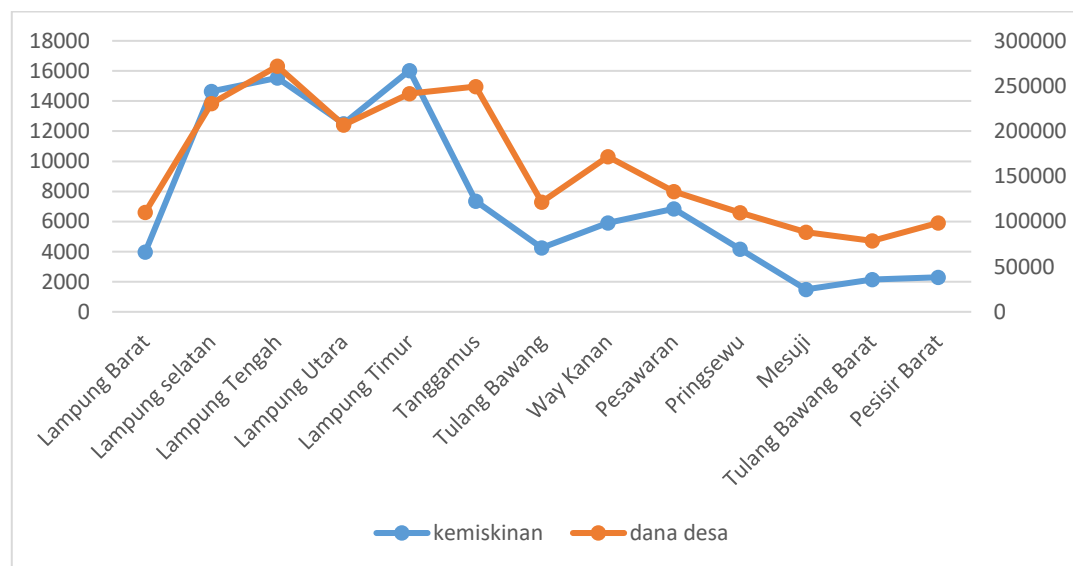
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Oleh karena itu, untuk mengatasi angka kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi, salah satu kebijakan yang telah diambil pemerintah, yang telah berjalan selama sembilan tahun terakhir adalah penyaluran dana desa.

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Ada dua tahap dalam penyaluran Dana Desa yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dana desa yang disalurkan nilainya relatif besar dan langsung diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah realisasi dana desa di Provinsi Lampung pada tahun 2021 menjadi salah satu yang tertinggi yaitu sebesar Rp 1.8 triliun dan telah disalurkan ke 2.435 desa dan dalam lima tahun terakhir anggarannya relatif meningkat.



Gambar 1. Rata-rata Kemiskinan dan Dana Desa Sejak Tahun 2015-2023 di Provinsi Lampung.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, penerima dana desa terbesar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 adalah Kabupaten Lampung Tengah. Namun, meskipun menjadi kabupaten dengan penerimaan dana desa terbesar, masih tidak terlihat adanya penurunan yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan, Kabupaten Tanggamus yang mendapatkan penerimaan dana desa tidak jauh berbeda dari Kabupaten Lampung Tengah memiliki penurunan kemiskinan yang terlihat negatif signifikan.

Grafik tersebut memperlihatkan adanya disparitas efektivitas penggunaan dana antar wilayah. Perbedaan pola antara grafik dana desa dan kemiskinan di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu serta-merta menurunkan kemiskinan secara drastis.

Hal ini bisa saja terjadi karena adanya ketidaksesuaian dari tujuan prioritas penggunaan dana desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa menegaskan bahwa salah satu prioritas dana desa adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Penggunaan 70 persen dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

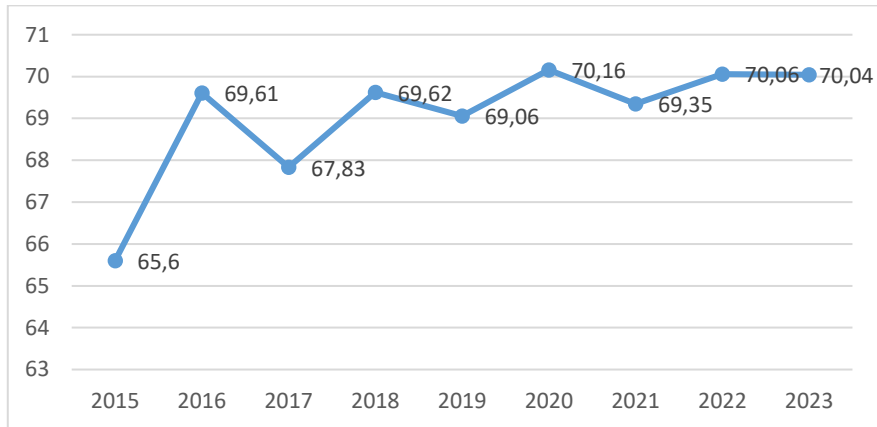
Sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Lalira et al. (2018), hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dana desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Untuk itu, harus dilakukannya penelitian lebih lanjut lagi mengenai pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

Menurut Ikhsan, M. & Shidiq (1999), masalah kemiskinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu modal sumber daya manusia yang diindikasikan dengan tingkat pendidikan, modal fisik produktif, dan status pekerjaan yang memberikan dampak bagi pola pendapatan seseorang. Modal sumber daya manusia atau *human capital* yang diindikasikan dengan tingkat pendidikan menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi kemungkinan seseorang bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Modal Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah (Nur et al. 2023). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) karena banyaknya jumlah penduduk produktif dengan tingkat produktivitas yang tinggi dapat mendorong pengembangan ekonomi di suatu negara dan mengurangi masalah kemiskinan. Pada dasarnya tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia cukup tinggi.

Menurut Simanjuntak (1985), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama. Semakin Besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka menggambarkan jumlah angkatan kerja di suatu negara semakin tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih besar. Akan tetapi, jika di suatu negara semakin besar tenaga kerja yang tergolong bukan angkatan kerja akan mengakibatkan semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Sementara itu untuk kondisi perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja yang ada di Provinsi Lampung cenderung berfluktuasi hal ini dapat dilihat dalam Gambar 3.



Gambar 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung.
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Pada Gambar 3, terlihat bahwa TPAK di Provinsi Lampung sembilan tahun terakhir secara garis besar terus mengalami peningkatan meskipun terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2015, TPAK Provinsi Lampung sebesar 65.6 persen kemudian meningkat sangat signifikan di tahun berikutnya menjadi 69,61 persen, kemudian kembali turun pada tahun 2017 menjadi 67.83 persen, trend turun naiknya TPAK di provinsi Lampung ini terus terjadi di tahun-tahun berikutnya, sampai di tahun 2021, TPAK Provinsi Lampung sebesar 69.35 persen, turun dari tahun sebelumnya namun lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan di tahun 2017, Tahun 2022 kembali naik menjadi 70.06 persen dan turun lagi pada tahun 2023 menjadi 70.04 persen. Meskipun telah terjadi penurunan, TPAK Provinsi Lampung mengindikasikan peningkatan dari tahun-tahun yang lalu. Hal ini mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat meskipun belum sepenuhnya stabil (Bank Indonesia 2021).

TPAK mempengaruhi kemiskinan karena jumlah penduduk yang besar akan membuat permasalahan baru dalam hal ketenagakerjaan. Banyaknya jumlah penduduk yang berusia produktif dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran yang akan menjadi salah satu penyumbang jumlah penduduk miskin. Sedangkan apabila semakin

besar TPAK, yang menunjukkan semakin besar pula angkatan kerja dalam kelompok yang sama dan semuanya berada didalam golongan angkatan kerja yang produktif bekerja, maka hal itu dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Namun, meskipun TPAK Provinsi Lampung memiliki kecenderungan meningkat, begitupun juga dengan kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini berkesinambungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfionika et al. (2021) dan Mufidah (2021) yang menyatakan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Semakin banyak angkatan kerja yang berada digolongan yang menganggur atau yang sedang berusaha mencari pekerjaan bisa menjadi penyebab TPAK tinggi namun penduduk miskin semakin banyak.

Peran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Perannya melalui kebijakan fiskal ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan). Menurut Mankiw (2003), Kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen utama yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan tiga tujuan yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Fungsi alokasi berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang sosial dan kombinasi dari barang sosial yang telah dipilih.
2. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat.
3. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran tersebut, maka konsekuensinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar sebagai bentuk pengeluaran semua kegiatan pemerintah untuk menunjang berlangsungnya ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat

digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota dibedakan menjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengeluaran pemerintah daerah dibagi menjadi atas urusan wajib yang diklasifikasikan menjadi dua puluh tujuh pos dan urusan pilihan yang diklasifikasikan menjadi delapan pos. Format baru ini merupakan reklasifikasi atas program yang dalam format lama pengeluaran rutin dan pembangunan per sektor. Pengeluaran pemerintah daerah yang dipergunakan baik dalam urusan wajib dan urusan pilihan menunjukkan alokasi pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama untuk mencapai pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran keempat sektor tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Peningkatan jumlah pengeluaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan). Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin merupakan syarat yang harus untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran saat ini, terutama mengingat peluang dari sisi fiskal. Pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pemerintah harus memperbesar alokasi belanja modal dan mengurangi biaya birokrasi. Ini dikarenakan kecenderungan anggaran yang meningkat namun tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini juga dikemukakan oleh Von Braun & Grote (2002), bahwa kesejahteraan

masyarakat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung dengan kemiskinan di dalam masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang produktif. Investasi pengembangan SDM diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan investasi pengembangan SDM membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2003), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro 2000).

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Efek pembangunan pada kedua sektor tersebut tidak dapat berdampak secara langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk merasakan dampaknya. Sehingga pemerintah harus membuat prioritas pembangunan untuk jangka panjang.

Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi bangsa yang beradab dan mampu bersaing di dunia internasional

(Saepudin et al. 2023). Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang dapat memutus mata rantai kemiskinan suatu negara. Pendidikan berhubungan dengan pembentukan karakter dan membangun pertahanan dalam suatu bangsa. Untuk itu, agar dapat disebut menjadi negara yang maju dan mampu memakmurkan kehidupan bangsa, membenahi sistem pendidikan menjadi lebih berkualitas merupakan salah satu jalannya.

Hal ini perlu diiringi dengan intervensi pemerintah melalui kebijakan yang diarahkan pada ketersediaan peluang masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehingga akan menjadi salah satu aspek penting untuk membangun dan meningkatkan suatu sistem perekonomian negara, khususnya di negara-negara berkembang. Selain itu, kualitas pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat, sehingga penghasilan yang diperoleh masyarakat sulit untuk dapat mencapai kondisi maksimum karena tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja. Berdasarkan teori lingkaran setan kemiskinan yang disampaikan Nurkse (1953), menunjukkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang dihasilkan, hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas yang dilakukan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Sejalan dengan teori Todaro & Smith (2011), bahwa ketika orang – orang berpendapatan rendah, baik dari keluarga sangat miskin atau bukan, umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anggota keluarganya dengan baik, sehingga memiliki keterbatasan untuk memperoleh akses ke pendidikan.

Selain pendidikan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan menjadi pilar utama dalam memperkuat modal manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kesehatan adalah suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hidup dalam kemiskinan mengakibatkan masyarakat hidup dilingkungan yang buruk dan tidak sehat, yang menyebabkan rentan terkena penyakit. Kemiskinan yang dialami menyebabkan masyarakat yang sudah terkena penyakit tidak bisa membayar biaya perawatan yang ada. Untuk masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, pendapatan yang dimiliki hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari tanpa mementingkan masalah kesehatan. Hal ini berarti, jika masyarakat miskin jatuh sakit dan tidak mampu membayar perawatan kesehatan maka akan mempengaruhi produktivitasnya, sehingga turut mempengaruhi tingkat pendapatannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salsabilla & Muljaningsih (2022) serta Isroviyah (2022), bahwa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Chairunnisa & Qintharah (2022), menyatakan bahwa kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah dana desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan, dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung”. Penelitian ini hanya akan menggunakan 13 Kabupaten, dikarenakan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tidak termasuk Kabupaten/Kota yang mendapatkan transfer dana desa. Ketiadaan data dana desa untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro disebabkan oleh perbedaan status administratif antara kota dan kabupaten. Sementara kabupaten memiliki desa yang dapat menerima dana desa, kota administratif mengelola wilayah melalui kelurahan yang tidak memiliki klasifikasi pedesaan sehingga tidak menjadi penerima dana desa. Jadi, bukan masalah data yang hilang, melainkan kebijakan alokasi yang memang tidak mencakup Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?
4. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?
3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?
4. Untuk menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023 ?

2) Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu bagi para pembacanya

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pengeluaran kas daerah yang berlaku. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, diantaranya :

1) Model Pembangunan Rostow dan Musgrave

Model ini menggambarkan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi terhitung besar, karena pemerintah harus menyediakan segala prasarana, seperti prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Pada tahap berikutnya peranan investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Adanya campur tangan swasta menimbulkan kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak, tahap ini disebut sebagai tahap menengah pembangunan ekonomi. Tahap terakhir yaitu tahap ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan, menurut Musgrave, suatu proses pembangunan diketahui dengan adanya persentase investasi swasta terhadap GNP (*Gross National Product*) semakin besar daripada persentase investasi pemerintah (Mangkoesoebroto 1995).

Menurut Jaelani (2018), model pembangunan Rostow dan Musgrave ini memberikan kerangka dasar bagi peningkatan pengeluaran pemerintah seiring dengan peranan pemerintah yang semakin besar. Meskipun dikembangkan berdasarkan riwayat pembangunan dari berbagai negara namun terdapat ketidakjelasan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara bertahap atau tahapan tersebut berlangsung simultan dan bersamaan.

2) Hukum Wagner Mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

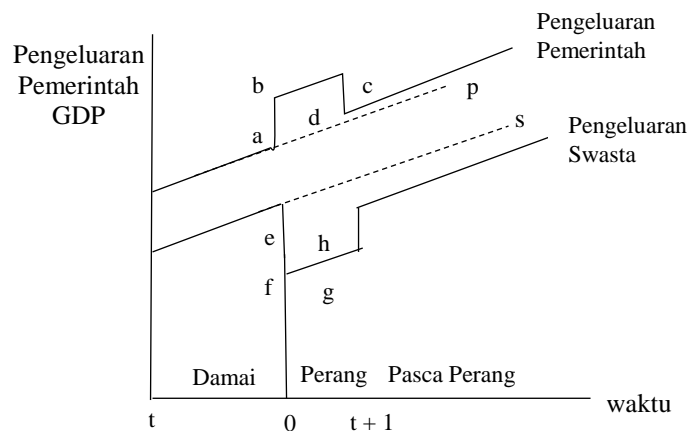
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Jaelani 2018). Menurut Musgrave, kondisi demikian disebut sebagai "*law of growing public expenditures*". Peningkatan ini terletak pada kegiatan dan kebutuhan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah. Hukum Wagner menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah maka semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah dan pengeluaran negara.

Hukum Wagner memberikan asumsi bahwa ada hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan pengeluaran pemerintah. Selain itu, didasarkan pada pengamatan empiris dari negara – negara maju, namun berpotensi menimbulkan kegagalan pasar dan eksternalitas karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Pandangan ini didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bersifat independen, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Mangkoesoebroto 1995)

3) Teori Peacock & Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Jaelani (2018) mengatakan bahwa meskipun demikian didalam teori ini juga dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya

pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Dalam keadaan normal, meningkatnya produk domestik bruto menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Jadi, berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga (Mangkoesebroto 1995).



Gambar 3. Kurva Teori Peacock dan Wiseman.
Sumber : Mangkoesebroto (1995)

Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga.



Gambar 4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman.
Sumber : Mangkoesoebroto (1995)

Teori Peacock dan Wiseman mendapat kritik oleh Bird. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pengeluaran pemerintah. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan sosial, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan normal. Jadi menurut Bird, efek pengalihan ini hanya berdampak dalam jangka pendek saja (Mangkoesoebroto 1995).

2. Fungsi APBN

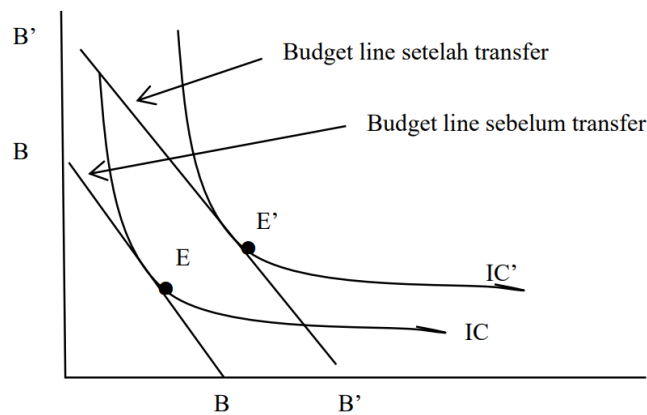
Berdasarkan Kementerian Keuangan (2018), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan cermin arah dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat dari Undang – Undang Dasar 1945. Keseluruhan kerangka APBN menggambarkan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal serta akuntabilitas pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Adanya fungsi tersebut mengharapkan bahwa kebijakan fiskal yang disampaikan dapat berjalan dengan tepat, efisien dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa fungsi APBN diantaranya yaitu fungsi alokasi, dalam hal ini anggaran dibagi secara proporsional dalam mengalokasikan pembangunan dan

pemerataan. Anggaran negara harus terarah untuk menurunkan pengangguran dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian. Sedangkan, untuk fungsi distribusi dalam APBN harus dapat menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan besaran alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan fungsi ini dapat mencapai tujuan pembangunan dalam hal pemerataan antar wilayah dan daerah dan tentunya kebijakan dalam anggaran harus memerhatikan aspek ketelitian agar dana yang disalurkan dapat mencapai rasa keadilan. Terakhir adalah fungsi stabilisasi, yang mengindikasikan bahwa anggaran negara harus dapat menjaga keseimbangan antara masyarakat, melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Tanpa intervensi maka gangguan disatu sektor akan mempengaruhi sektor lain yang nantinya berpengaruh pada stabilisasi ekonomi.

3. Transfer

Menurut Kusuma (2016), konsep desentralisasi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan prinsip – prinsip pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada pemerintah daerah yang sebagian dibiayai oleh anggaran nasional yang ditetapkan dalam dana transfer. Kewenangan untuk mengelola dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat pembangunan daerah berdasarkan karakter dan kebutuhan masing – masing.



Gambar 5. Dampak Transfer pada Anggaran Daerah.
Sumber : Hendra Kusuma (2016)

Gambar 6. menggambarkan dampak transfer pada struktur fiskal daerah. Sesuai dengan konsep teori konsumsi yaitu tingkat kepuasan atas barang dan jasa meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, hal ini digambarkan dengan oleh pergeseran garis anggaran. Maka, belanja daerah terutama pada barang publik dan swasta dapat ditingkatkan bila ada perubahan positif dalam fiskal daerah. Keuangan daerah karena adanya dana transfer digambarkan oleh garis anggaran yang sebelumnya di garis BB bergeser ke garis B' B'. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pengeluaran untuk menyediakan berbagai barang publik. Pergeseran pada E ke garis E' menunjukkan pergeseran tingkat pengeluaran pada kombinasi antara barang publik dan swasta.

4. Keuangan Daerah

1) Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Kementrian Keuangan (2018), Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah memuat hak daerah dan kewajiban daerah. Hak daerah merupakan segala sesuatu yang secara hukum adalah milik daerah dan juga milik pemerintah. Sedangkan, kewajiban daerah berupa segala sesuatu yang harus dilaksanakan terkait dengan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab nya. Akan menjadi bagian dari keuangan daerah apabila hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik (Mizkan, dkk. 2015). Dalam Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah harus

transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik juga sangat diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Arham & Hatu (2020) bahwa untuk tingkat pemerintah daerah khususnya pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas perangkat desa melalui lokakarya, pendidikan bagi kepala desa, dan pelatihan untuk mengatasi masalah tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan di pedesaan.

5. Pendapatan Desa

Menurut Kementrian Keuangan (2018), diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan kestabilan dalam perekonomian, terutama dalam upaya meningkatkan belanja pemerintah. Salah satunya yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran yang terdapat didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut akan di alokasikan ke berbagai bidang yang menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya yaitu :

1) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli desa lainnya.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten, yang terdiri atas bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota.

3) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya bersumber dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

Terdapat berbagai bentuk prioritas pemerintah dalam alokasi anggaran, namun yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah salah satu bagian dari pendapatan transfer yaitu dana desa.

Menurut Undang-undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa dan menjamin kepastian hukum dari sisi pembiayaan, pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 72 ayat (2) bahwa desa akan memperoleh pembiayaan berupa alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dan besaran alokasi anggaran dari APBN yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dana diluar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap (Marselina 2015).

Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya *unconditional*. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selaku pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan (anggaran belanja) (Arham dan Hasan 2017).

Dana Desa mulai diberlakukan sejak 2015 oleh pemerintah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dimana Dana Desa tersebut di alokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang mengenai desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014. Melalui dana desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom (Setianingsih 2016).

4) Prinsip Penggunaan Dana Desa

Menurut Kementerian Keuangan (2018), ada 6 (enam) prinsip penggunaan dana desa yang perlu menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, diantaranya :

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda – bedakan. Dengan ini diharapkan timbulnya pemerataan antar masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

b. Prinsip Kebutuhan

Prioritas Prinsip ini pada dasarnya mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Dengan ini pemerintah desa dapat membuat program-program yang dinilai lebih penting didahulukan dengan melihat kondisi aktual dari desa.

c. Prinsip Kewenangan Desa

Prinsip ini lebih kepada mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

d. Prinsip Partisipatif

Prinsip ini mengedepankan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Pada hakikatnya lebih kepada pemberdayaan sumber daya manusia di desa, sehingga masyarakat akan lebih produktif dan mengasah kemampuan.

e. Prinsip Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

f. Prinsip Tipologi Desa

Prinsip ini mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

g. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 5 dan 6, Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1) Peningkatan kualitas hidup

Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

2) Peningkatan kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

a) Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan

- b) Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan
 - c) Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin
 - d) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Penanggulangan kemiskinan
- Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:
- a) Membiayai program penanggulangan kemiskinan
 - b) Melakukan pemutakhiran data kemiskinan
 - c) Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja
 - d) Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin
 - e) Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- 4) Peningkatan pelayanan publik
- Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan muncul dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kehidupan sosialnya. Keterbatasan itu bisa berasal dari sisi pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan lain – lain. Selain itu, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Head Count Index (HCI-P0) digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk menunjukkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2021).

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018), berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- b. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- c. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- d. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- e. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

Menurut Sangadji et al. (2015) kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks mencakup sosial – ekonomi, yang memiliki karakteristik utama yaitu rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Hal ini memerlukan penanganan dan

strategi khusus yang sesuai karakteristiknya agar angka kemiskinan yang begitu tinggi menjadi berkurang.

Kemiskinan memiliki definisi yang luas, dan bukan hal yang mudah untuk mengukur kemiskinan. Terdapat beberapa ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan, diantaranya yaitu :

a. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural muncul dikarenakan unsur budaya disuatu daerah yang membuat masyarakat tidak bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri, yang cenderung sulit untuk memperbaiki taraf hidup atau bisa dikatakan sebagai mentalitas kemiskinan. Selain itu, disebabkan pula oleh adanya adat, atau sifat dari para anggota masyarakat yang membuat mereka menjadi miskin. Pandangan hidup, nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat mendorong terwujudnya kemiskinan kultural. Ciri – ciri budaya miskin yaitu ketika keadaan masyarakat memiliki sistem perekonomian yang berorientasi pada mencari keuntungan, tingginya angka pengangguran, rendahnya upah yang diperoleh para pekerja, tidak adanya organisasi sosial, politik, dan ekonomi bagi kaum miskin yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya, adanya sistem kekeluargaan yang bilateral, dan adanya kelas masyarakat yang dominan menekankan pada penumpukan harta dan kekayaan, serta kesempatan untuk terus meningkat dalam status (*upward mobility*) (Palikhah 2017).

b. Kemiskinan Struktural

Menurut Soemardjan et al. (1980), kemiskinan struktural terjadi karena adanya struktur sosial yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses sumber – sumber pendapatan yang tersedia untuk mereka. Masih terdapat kesenjangan pada penguasaan sumber – sumber daya ekonomi, yaitu didominasi oleh kelompok elit. Masyarakat tidak seluruhnya terlibat dalam pengambilan kebijakan sehingga menimbulkan kesenjangan dan terkadang terdapat aspek diskriminatif.

Kemiskinan struktural akan berbeda sesuai dengan struktur sosial masyarakat dan pihak penguasa yang bermain. Masyarakat berada pada kondisi termarginalisasi dan dalam posisi struktur sosial yang timpang sehingga berada dalam kondisi miskin dan dimiskinkan. Kemiskinan struktural dapat berupa jenis pekerjaan sebagai petani/buruh tani dan pekerja informal, yang lebih memprioritaskan keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, memiliki anggapan bahwa kebijakan pendidikan dirasa terlalu mahal, serta masih rendahnya partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

c. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut dilihat dari keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan masyarakat lebih rendah dari standar hidup yang ditentukan. Kemiskinan absolut dapat disebabkan karena adanya konflik, kesenjangan, kekerasan, kapasitas pemerintah yang terbatas, dan lain-lain.

d. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diidentifikasi terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan (Wahyu R. 2009). Ukuran standar minimum dilihat dari kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan berdasarkan pada golongan masyarakat termiskin.

Terdapat tiga paradigma terkait dengan akar penyebab kemiskinan, yaitu pertama, paradigma konservatif, memandang kemiskinan berasal dari karakteristik khas orang miskin, seperti tidak mau bekerja, boros, dan faktor internal lainnya. Jadi, kemiskinan disebabkan oleh budaya atau dikenal dengan kemiskinan kultural, kemiskinan ini dapat diatasi dengan pengembangan kelembagaan. Kedua, paradigma konvensional liberal memandang bahwa kemiskinan merupakan realitas dan adaptasi atas situasi lingkungan yang penuh diskriminasi dan sempit peluang, sehingga yang membedakan hanya pada

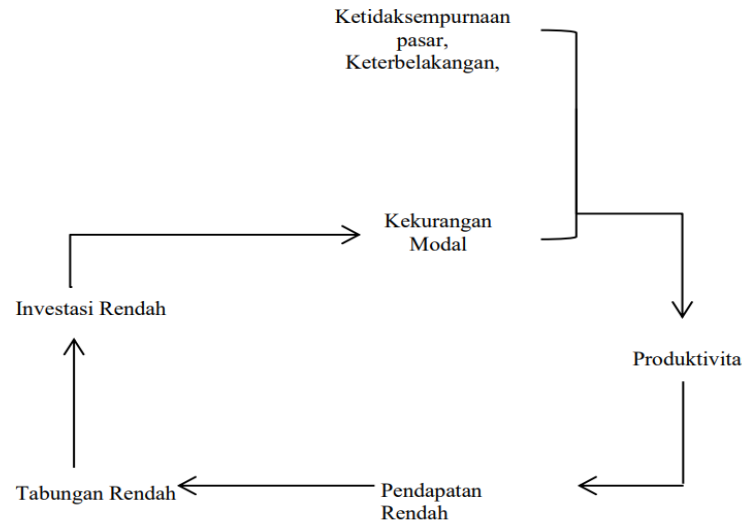
posisi mereka yang kurang menguntungkan. Kemiskinan ini dapat diatasi dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama. Ketiga, paradigma radikal, yang menekankan peranan struktur ekonomi, politik, dan sosial. Kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi dan politik yang memaksa untuk hidup miskin sehingga membawa persepsi bahwa orang menjadi miskin sebab di eksploitasi. Negara – negara menjadi miskin karena secara sistematis dimiskinkan (Yustika 2009).

Suatu wilayah yang terjebak pada kemiskinan, terlebih lagi memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan yang sangat tinggi akan mengakibatkan peristiwa buruk atau faktor lain akan muncul, inilah yang terjadi dalam lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Menurut Apriyanti & Hendarto (2011), lingkaran setan kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan.

Menurut Nurkse (1953), ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. Kedua, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah.

Hal ini didukung pula oleh Kuncoro (1997), bahwa lingkaran kemiskinan juga didukung oleh keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna, dan modal yang tidak mencukupi (yang menyebabkan produktivitas rendah). Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang akan diterima juga rendah. Pendapatan yang rendah dapat berpengaruh pada rendahnya tabungan dan investasi. Dengan demikian, ketika

investasi lebih sedikit dapat menyebabkan pembangunan yang tidak merata, dan seterusnya.



Gambar 6. Lingkaran Kemiskinan Menurut Nurkse.

Menurut Nurkse (1953), bahwa negara itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor). Berarti bahwa negara miskin karena tidak punya apa – apa, dan tidak punya apa – apa menyebabkan negara menderita kemiskinan. Menurut Suman (2007), ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu :

- a. Menggali potensi kekayaan alam.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja.
- c. Menggiatkan masyarakat untuk menabung.
- d. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Di Indonesia sendiri ada 3 program penanggulangan kemiskinan yang tercantum didalam Perpres No 13 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Sukirno (2016), angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Sedangkan, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Melihat dari hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990 sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas untuk kategori usia kerja. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, penduduk usia kerja adalah yang telah berusia 15 tahun atau lebih.

TPAK merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang dapat memberikan gambaran yang jelas sampai seberapa jauh sebenarnya penduduk yang termasuk usia kerja (sepuluh tahun keatas) benar-benar aktif didalam bekerja dan tidak aktif bekerja. Jadi TPAK perbandingan antara angkatan kerja penduduk dalam

usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100 \text{ persen}$$

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan dampak dari semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitupun sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja (masih bersekolah dan mengurus rumah tangga) semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang membuat persentase TPAK juga mengecil.

Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa TPAK adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang tinggi pula yang mempengaruhi PDB. Begitu pun pada pendapatan per kapita. meningkatnya TPAK suatu daerah, berarti meningkat pula pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya TPAK meliputi :

a. Jumlah Penduduk Bersekolah dan Mengurus Rumah Tangga

Hubungan antara TPAK dan jumlah penduduk yang masih bersekolah adalah semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang berarti semakin kecil TPAK.

b. Tingkat Umur

Umur berkaitan dengan TPAK, dengan adanya kenyataan bahwa penduduk berumur muda umumnya mempunyai tanggung jawab yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga dan mereka umumnya bersekolah.

c. Tingkat Upah

Kaitan antara tingkat upah TPAK adalah melalui kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berhubungan dengan TPAK karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja.

8. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengaruh pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga terhadap perilaku dan pengambilan keputusan, yang akan meningkatkan kemungkinan sukses dalam menjangkau kebutuhan pokok, bahkan pendidikan akan membuat seorang terhindar dari kondisi miskin.

Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin dan Bonar 2004). Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan berkurangnya kemiskinan.

Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut *Center for the Study of Living Standards* (2001) dalam Toyamah et al. (2004) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.

9. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas (Budiharto 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Disajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah di teliti dalam membahas terkait dana desa, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis/Tahun	Metode	Hasil
1.	Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Matondang et al. (2024)	Metode regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM)	Peningkatan IPM berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Namun, TPAK tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
2.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan	Carolina (2022)	Metode regresi dengan pendekatan kuantitatif	Variabel subsidi (X1) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Semakin besar subsidi, kemiskinan meningkat. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (X2) berpengaruh terhadap kemiskinan (Y). Semakin besar pengeluaran untuk pendidikan, kemiskinan menurun. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan (X3) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
4.	Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa	Bukhari (2021)	Metode <i>explanator y research</i> dengan data sekunder	Jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan.

Lanjutan (Tabel 4)

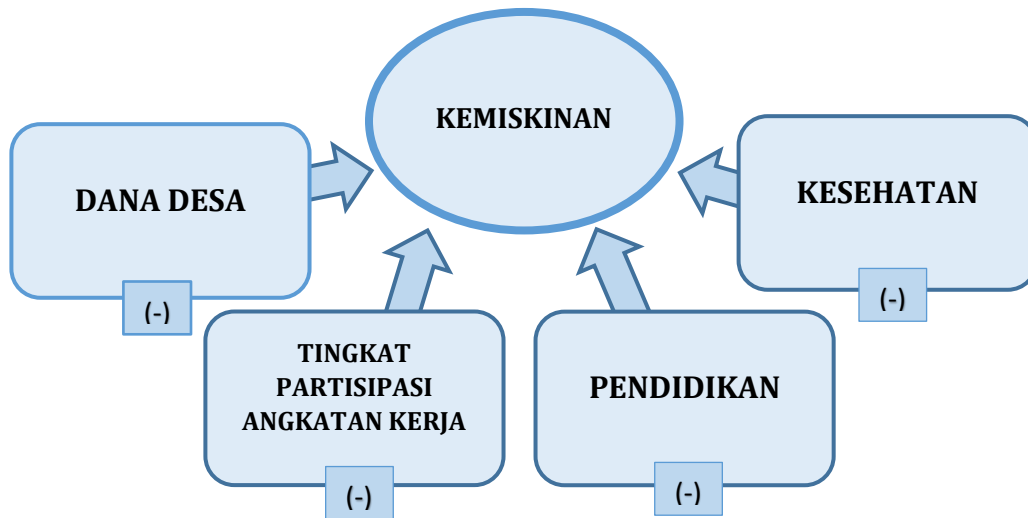
No.	Judul	Penulis/Tahun	Metode	Hasil
3.	Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020	Nila Isroviyah (2022)	Metode Analisis regresi Data Panel.	Pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
6.	Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	(Fauziah, Juliprijanto, dan Prakoso 2021)	Metode Analisis Regresi Data Panel	Investasi dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, kesehatan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2019.
5.	Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat	A. Ritonga, H. Handral, dan F. Andrianus al. (2021) .	Metode Analisis regresi Data Panel Melalui Pendekatan <i>Fix Effect Model</i> .	Terdapat pengaruh negatif dana desa terhadap pertumbuhan dan terhadap kemiskinan serta memiliki hubungan yang signifikan. Pengaruh tersebut pada kurun waktu penelitian terbilang tidak besar terhadap kemiskinan, serta dianggap tidak efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Variabel jumlah pengangguran, rata-rata upah, dan angkatan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan tidak memiliki hubungan yang signifikan serta variabel jumlah pengangguran dan angkatan kerja memiliki hubungan signifikan terhadap kemiskinan dan berpengaruh negatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan gabungan dari ide – ide penelitian terdahulu yang di kumpulkan dan di perbaharui baik dari segi lokasi penelitian, waktu penelitian, dan variabel – variabel independen yang digunakan.

C. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa menegaskan bahwa salah satu prioritas dana desa adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Program Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dana desa dapat diketahui melalui adanya perubahan pada kualitas hidup, kesejahteraan, kemiskinan, peningkatan jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan peningkatan angka harapan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program dana desa merupakan salah satu solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Begitu juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, bahwa diharapkan dengan banyaknya penduduk berusia produktif yang bekerja dan menghasilkan pendapatan dapat mengurangi kemiskinan. Sedangkan semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk pamarataan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang bersumber dalam APBD diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, karena pendidikan merupakan salah satu dasar untuk banyak manusia mencapai mimpinya dan mampu menghasilkan pendapatan yang sepadan, sedangkan akses kesehatan yang baik mampu menjamin masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi tanpa harus mengkhawatirkan kesehatannya yang akan sulit untuk disembuhkan atau pendapatan yang sudah dikumpulkan justru habis untuk mengakses kesehatan yang berada di kota-kota besar karena kurangnya pemerataan kesehatan di daerah-daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 7. Skema Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

1. Diduga dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
2. Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
3. Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.
4. Diduga kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif inferensial yaitu untuk menganalisis dan mengetahui kemiskinan di Provinsi Lampung. Kemiskinan sebagai variabel dependen sedangkan untuk variabel independennya menggunakan data dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan yang ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan kesehatan yang ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dan analisis regresi sehingga dari hasil analisis tersebut dapat menarik kesimpulan atas penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *cross section* untuk 13 kabupaten di Provinsi Lampung dan data *time series* untuk tahun 2015-2023. Jumlah observasi secara keseluruhan adalah 117.

Jumlah pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 pemerintahan. Namun, penelitian ini hanya menggunakan 13 Kabupaten, dikarenakan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tidak termasuk Kabupaten/Kota yang mendapatkan transfer dana desa. Kota Bandar Lampung dan Kota Metro adalah kota administratif yang tidak memiliki wilayah dengan klasifikasi wilayah pedesaan, sehingga tidak dapat menerima dana desa.

Tabel 5. Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Periode	Satuan Ukur	Sumber Data
Kemiskinan	KM	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
Dana Desa	DD	Tahunan	Juta Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK	Tahunan	Persen	Badan Pusat Statistik
Pendidikan	PDD	Tahunan	Juta Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kesehatan	KS	Tahunan	Juta Rupiah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Kemiskinan (KM)

Variabel ini menggunakan data jumlah penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

BPS menghitung Garis kemiskinan berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif. Garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat

harga, standar hidup, dan pola konsumsi di setiap daerahnya. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan.

2. Variabel Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang disediakan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten, serta dikhususkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan data yang dihitung per tahun dan dalam satuan juta rupiah.

3. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk kerja}}{\text{Jumlah Pen. Usia Kerja}} \times 100 \text{ persen}$$

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PDD)

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan atau belanja fungsi pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan data yang dihitung per tahun dan dalam satuan juta rupiah.

5. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (KS)

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan atau belanja fungsi kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan data yang dihitung per tahun dan dalam satuan juta rupiah.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda menggunakan regresi data panel, dengan menggunakan aplikasi olah data yaitu Eviews 10 sebagai alat analisis. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel maka digunakan analisis statistik yaitu Analisis Regresi Data Panel, Uji Spesifikasi Model, Uji Asumsi Klasik, *Individual Effect*, dan Uji Hipotesis.

1. Spesifikasi Model Penelitian

Regresi Data Panel (*Panel Pooled Data*) adalah gabungan data *cross section* dan *time series* (Widarjono 2018). Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana β_0 adalah intersep atau konstanta, β_1 adalah koefisien regresi, dan ε_i adalah variabel gangguan (*error*). Sedangkan persamaan model regresi *times series* adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, t$$

Dimana t menunjukkan banyaknya periode waktu data *time series*.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka model regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \quad n = 1, 3, \dots, n ; t = 1, 2, \dots, t$$

Dimana n adalah banyaknya variable bebas, i adalah jumlah unit observasi, t adalah banyaknya periode waktu, sehingga $(n \times t)$ menunjukkan banyaknya data panel yang akan di analisis.

Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 PDD_{it} + \beta_4 KS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

KM_{it} : Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)

β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi
DD_{1it}	: Dana Desa (dalam juta rupiah)
$TPAK_{2it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (dalam persen)
P_{3it}	: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (dalam juta rupiah)
K_{4it}	: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (dalam juta rupiah)
ε	: <i>error term</i>
i	: Unit <i>cross section</i> 13 Kabupaten di Provinsi Lampung
t	: Unit <i>time series</i> tahun 2015-2023

Untuk mempermudah dalam proses interpretasi hasil regresi dan menghindari masalah asumsi klasik, penelitian ini akan mentransformasi model di atas menjadi model L-linier (double-log atau log-log). Dalam model log-linier, variabel independen dan dependen dinyatakan dalam bentuk logaritnya yang selanjutnya akan notasikan sebagai Log. Koefisien regresi yang ditunjukkan pada log dari sebuah regresi diinterpretasikan sebagai elastisitas. Gujarati & Porter (2009) menyatakan estimator OLS yang didapatkan akan menjadi Best, Linear, dan Unbiased (BLUE) Estimator.

Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini dengan menggunakan model log-linier menjadi sebagai berikut :

$$\text{LogKM}_{it} = \beta_0 + \text{Log}\beta_1 DD_{it} + \text{Log}\beta_2 TPAK_{it} + \text{Log}\beta_3 PDD_{it} + \text{Log}\beta_4 KS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

KM_{it}	: Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi
Log	: Notasi Logaritma
DD_{1it}	: Dana Desa (dalam juta rupiah)
$TPAK_{2it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (dalam persen)
P_{3it}	: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (dalam juta rupiah)
K_{4it}	: Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan (dalam juta rupiah)

ε : *error term*
i : Unit *cross section* 13 Kabupaten di Provinsi Lampung
t : Unit *time series* tahun 2015-2023

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, antara lain: pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), dan pendekatan *random effect* (Widarjono 2018).

Dalam mengestimasi data panel menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan *pooled Least Square* (OLS) atau *common effect*; Estimasi model *common effect* merupakan salah satu model analisis regresi data panel yang paling sederhana. Dalam model analisis ini diasumsikan bahwa intersep dan *slope* selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Sistematis model ini menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section* ke dalam data panel (*pooled data*) yang dapat diregresi menggunakan metode OLS.
- 2) Pendekatan *Fixed Effect Model*; Estimasi ini merupakan suatu pendekatan yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar individu. Namun demikian, slopenya sama antar individu.
- 3) *Random Effect Model*; Model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu atau antar individu. Pada model ini intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing individu, model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

2. Uji Spesifikasi Model Penelitian

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pemilihan model regresi data panel yang paling tepat, diantaranya :

1) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect* :

H_0 : tidak ada beda (*Common Effect*)

H_a : ada beda (*Fixed Effect*)

- a. Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *common effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.
- b. Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *common effect*.
- c. Jika, model yang terpilih adalah model *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui apakah lebih baik memakai *fixed effect* model atau *random effect model*.

2) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *random effect*. Hipotesis dalam Uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : OLS tidak efisien (*Random Effect*)

H_a : OLS efisien (*Fixed Effect*)

- a. Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *random effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.
- b. Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

3) Uji Spesifikasi Model dengan Uji BG – LM Test

Uji Breusch Pagan – Lagrange Multiplier Test digunakan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect*.

H_0 : tidak ada beda (*Common Effect*)

H_a : ada beda (*Random Effect*)

- a. Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih besar dari $\alpha = 5$ persen maka H_0 diterima, jadi model yang tepat adalah *common effect* dibandingkan dengan model *random effect*.
- b. Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen maka H_0 ditolak, jadi model yang tepat adalah *random effect* dibandingkan dengan model *common effect*

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai salah satu prasyarat analisis pada regresi untuk menilai hasil regresi yang ada merupakan hasil estimasi yang terbaik dan layak untuk dianalisis.

1) Uji Normalitas

Menurut Widarjono (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual hasil regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian untuk mengetahui normalitas data melalui Uji Jarque-Bera, yang didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat asymptotic. Jika, residual terdistribusi normal maka nilai statistik Jarque-Bera akan sama dengan nol.

H_0 : Residu tersebar secara normal

H_a : Residu tersebar tidak normal

- a. Jika nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque-Bera besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari Jarque-Bera tidak signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik Jarque-Bera mendekati nol (Widarjono 2018).

- b. Jika nilai probabilitas ρ dari statistik Jarque-Bera kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik Jarque-Bera tidak sama dengan nol (Widarjono 2018).

2) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Widarjono (2018), uji heteroskedastisitas terkait dengan variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak yaitu menggunakan metode Glejser, yaitu melakukan regresi nilai absolut dengan variabel independennya.

Kriteria pengujian heteroskedastisitas yaitu :

- a. Jika probabilitas $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ tidak signifikan secara statistik maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika probabilitas $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ signifikan secara statistik maka dapat disimpulkan bahwa model mengandung masalah heteroskedastisitas.

3) Deteksi Multikolinieritas

Menurut Widarjono (2018), indikasi awal terjadi masalah multikolinieritas adalah apabila model regresi mempunyai standard error yang besar dan nilai statistik t yang rendah. Asumsi klasik menyatakan tidak ada hubungan *exact collinearity* antara variabel independen. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi.

4. Individual Effect

Individual effect menjelaskan bahwa setiap entitas memiliki intersep yang berbeda-beda. Nilai *individual effect* diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Konstanta *fixed effect* dengan nilai *coefficient effect* masing-masing kabupaten dalam penelitian.

Ada dua model utama yang sering digunakan untuk menguji efek untuk setiap entitasnya, yaitu :

1. *Fixed Effect Model* (FEM), model ini mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki intersep unik yang konstan, kemudian menyerap karakteristik unik masing-masing entitas agar dapat melihat efek murni dari variabel yang diteliti.
2. *Random Effect Model* (REM), model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu bersifat acak dan menganggap bahwa variasi antar individu merupakan bagian dari komponen error acak.

5. Pengujian Hipotesis

1) Uji t

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H_0), keputusan tersebut diperoleh dari data. Hal yang penting dalam hipotesis penelitian yang menggunakan data sampel dengan menggunakan uji t adalah masalah pemilihan apakah menggunakan dua sisi atau satu sisi (Widarjono 2018). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dana Desa

$H_0 : \beta_1 = 0$, Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

$H_a : \beta_1 < 0$, Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$H_0 : \beta_2 = 0$, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung

$H_a : \beta_2 < 0$, Pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

d. Pendidikan

$H_0 : \beta_3 = 0$, Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

$H_a : \beta_3 < 0$, Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

e. Kesehatan

$H_0 : \beta_4 = 0$, Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung

$H_a : \beta_4 < 0$, Kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Lampung.

Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H_0 sebagai berikut :

- a. Jika, nilai $t_0 >$ nilai t_α dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 15$ persen) maka H_0 ditolak atau menerima H_a . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap kemiskinan.
- b. Jika, nilai $t_0 <$ nilai t_α dan nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 ($\alpha = 15$ persen) maka H_0 diterima atau menolak H_a . Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap kemiskinan.

2) Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi model dengan melakukan uji hipotesis secara bersama koefisien regresi (Widarjono 2018). Formulasi uji statistik F dinyatakan sebagai berikut :

$$F = [R^2 / (k - 1)] / [(1 - R^2) / (n - k)]$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien Determinasi

K : Jumlah Variabel Independen

N : Jumlah Sampel

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$

$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$

Untuk mencari F hitung sesuai dengan rumus diatas dan nilai F kritis dari tabel distribusi F. Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H_0 sebagai berikut :

- a. Jika, nilai $F_0 >$ nilai $F\alpha$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a . Artinya secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap Kemiskinan.
- b. Jika, nilai $F_0 <$ nilai $F\alpha$ maka H_0 diterima atau menolak H_a . Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

3) Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam regresi berganda untuk mengukur besaran proporsi dari total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi atau R – Square terletak antara 0 dan 1. Kriteria model yang baik adalah jika nilai R^2 mendekati satu karena dinilai semakin mampu menjelaskan data aktualnya dan sebaliknya jika R^2 mendekati 0 maka bisa dikatakan bahwa model kurang baik. Koefisien determinasi akan semakin besar jika variabel independen terus ditambah ke dalam model regresi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015-2023. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023.
3. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang ditunjukkan oleh variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023.
4. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang ditunjukkan oleh variabel kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023.
5. Dana desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan, dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2015-2023.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus bisa menggunakan dana desa secara tepat sasaran. Hal ini karena salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pengentasan kemiskinan, maka sudah seharusnya pemerintah daerah membuat banyak program mengenai pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Walaupun pembangunan infrastruktur dapat saja dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pemilihan jenis infrastruktur yang berdampak pada ekonomi, namun di lapangan banyak ditemukan desa membangun prasarana seperti gapura desa, kantor desa, atau pagar desa yang akan kecil dampaknya terhadap ekonomi apalagi pengurangan kemiskinan.
2. Pemerintah daerah harus meningkatkan belanjanya dalam sektor pendidikan untuk menghilangkan kesenjangan antara pendidikan di daerah-daerah dengan di kota-kota besar, menggalakkan melek teknologi dan pelatihan skill guna mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Alokasi anggaran pendidikan hendaknya lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dalam hal pendidikan pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan kesempatan kerja praktek atau magang bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat belajar skill baru yang tidak diajarkan di pendidikan.
3. Sektor kesehatan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan khususnya oleh pemerintah daerah karena kesehatan sangat berguna untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan, bagaimana masyarakat mendapatkan penghasilan jika kesehatannya terganggu dan sistem kesehatannya sulit dijangkau, hal ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar selalu menyiapkan pelayanan kesehatan yang memadai di setiap daerah terutama daerah-daerah yang masih tepencil.
4. Pemerintah daerah hendaknya dapat membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, dengan upah yang sepadan, sehingga generasi muda sebagai kelompok produktif dalam sistem partisipasi kerja bisa tetap bersinergi di daerahnya masing-

masing, hal ini juga dapat mengurangi badai migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfionika, Rekha, Yulmardi, dan Hardiani. 2021. "Analisis determinasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi." *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* 10(1):47–58. doi: 10.22437/jels.v10i1.12456.
- Anon. 2009. "Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009." 2:1–8.
- Apriyanti, L., & Hendarto, M. 2011. "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 - 2010)." *Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro*.
- Arham, M. A., dan R. Hatu. 2020. "Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7(10):433–442.
- Arham, Muhammad Amir, dan Yusrin Hasan. 2017. "Village Fund Transfers and Imbalance of Income Distribution in Indonesia." *Terobosan Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi* 82–91.
- Arsita, Nila, dan Noverman Duadji. 2019. "Analisis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 1(1):63–73. doi: 10.23960/administrativa.v1i1.7.
- Ayu, Indah Novarizki, dan Muhammad Husaini. 2013. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persentase pada sepuluh kabupaten/kota di Propinsi Lampung 2006-2010." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2(1):1–15.
- Von Braun, Joachim, dan Ulrike Grote. 2002. "Does Decentralization Serve the Poor?" *IMF-conference on fiscal decentralization 20-21 2000(November)*:2–13.
- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bukhari, Eri. 2021. "Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21(2 SE-Articles):219–28. doi:

10.31599/jki.v21i2.540.

- Carolina, Martha. 2022. "The Effect of Government Expenditures in The Field of Subsidies, Education and Health on Poverty." *Jurnal Budget* 7(1):165–80.
- Chairunnisa, Nurlaila Maysaroh, dan Yuha Nadhirah Qintharah. 2022. "Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7(1):147–61. doi: 10.51289/peta.v7i1.530.
- Diansyah, Rama. 2022. "Pesawaran Urutan 2 se-Lampung Berhasil Tekan Angka Kemiskinan." *Rmollampung*, Desember.
- Fauziah, Dela Rahmah, Whinarko Juliprijanto, dan Jalu Aji Prakoso. 2021. "Pengaruh Investasi, Pendidikan, Kesehatan, Dan Tpak Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019." *DINAMIC : Directory Journal of Economic* 3(1):53–68.
- Hasanuddin, Tubagus, Dame G, dan Teguh Endaryanto. 2009. "Akar Penyebab Kemiskinan Petani Hortikultura di Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung." *Agrikultura* 20(3):164–70. doi: 10.24198/AGRIKULTURA.V20I3.947.
- Ikhsan, M., dan A. R. Shidiq. 1999. "Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia." *Economics and Finance in Indonesia*.
- Isroviyah, Nila. 2022. "Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Jaelani, A. 2018. "Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017." *SSRN Electronic Journal* 1:1–14. doi: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3185800>.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kusuma, Hendra. 2016. "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9(1):1–11.
- Lalira, Dianti, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong. 2018. "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(4):62–72.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.

- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marselina. 2015. "Membedah APBD." *Graha Ilmu*.
- Matondang, Khairani Alawiyah, Nazwa Fazirah Nasution, Zakia Hasanah Hasibuan, dan Arnol Prabowo Siagian. 2024. "Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2(2):460–68. doi: 10.57235/mantap.v2i2.2927.
- Mizkan, Hendra, Kamaliah Kamaliah, dan Restu Agusti. 2015. "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru." *Sorot* 10(1):114. doi: 10.31258/sorot.10.1.3209.
- Mufidah, L. 2021. "Pengaruh investasi, belanja daerah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2015" *Skripsi-2021*.
- Nur, Novia, Arif Wijayanti, Arivina Ratih, Moneyzar Usman, Neli Aida, dan Ukhti Ciptawaty. 2023. "Economics and Digital Business Review Analisis Pengaruh Investasi , Angkatan Kerja , dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021." 4(2):245–65.
- Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.
- Palikhah, N. 2017. "Konsep Kemiskinan Kultural." *Alhadharah* 15(30):1. doi: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1205>.
- Rasidin, K. Sitepu, dan M. Sinega Bonar. 2004. "Dampak Investasi Sumber DayaManusiaTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan DiIndonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium." *Journal unud*.
- Ritonga, Andy, Hefrizal Handra, dan Fery Andrianus. 2021. "Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat." *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 16(2):277. doi: 10.20961/region.v16i2.32968.
- Saepudin, Saepudin, Marselina Marselina, Heru Wahyudi, dan Ukhti Ciptawaty. 2023. "Kontribusi Mahasiswa untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Entrepreneur School di Desa Wonoharjo , Tanggamus , Lampung (Student Contribution to Reducing Poverty Level through Entrepreneur School in."

1(2):83–96.

- Salsabilla, Amadea, dan Sri Muljaningsih. 2022. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Malang.” *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10(1):10–20. doi: 10.34308/EQIEN.V10I1.471.
- Sangadji, S. Abadi, T.W., dan L. Fauziah. 2015. “Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo.” *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31(2):495. doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1563>.
- Setianingsih, Irma. 2016. “Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi.” 1–23.
- Simanjuntak, P. J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: FE UI.
- Soemardjan, S., Alfian, dan Mely G. Tan. 1980. *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi 3. Jasakom.
- Suman, A. 2007. “Pemberdayaan Perempuan Kredit Mikro dan Kemiskinan: sebuah Studi Empiris.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 9(1):pp-62.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. 3 ed. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kese. Jakarta: Erlangga.
- Toyamah, Nina, dan Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah : Implikasi Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Jakarta.
- Wahyu R., Tri. 2009. “Kemiskinan dan Bagaimana Memerangnya.” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4(7):56–65. doi: <https://doi.org/10.31942/akses.v4i7.514>.
- Wahyudi, Heru, dan Siti Nur Khotimah. 2022. “Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung.” *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik* 1(1):45–57. doi: 10.35912/sekp.v1i1.1423.
- Widarjono, Agus. 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews Edisi Kelima*. 5 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widiastuti, Tuti. 2010. “Kemiskinan Struktural Informasi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*

8(3):314–29.

Wijayanti, Diana, dan Heri Wahono. 2005. “Analisis Konsentrasi Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 1999-2003.” *Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN Kajian Ekonomi Negara Berkembang* 10:215–25.

Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.